

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abubakar M.A., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press, 2021.
- Achmad Kosasih, *Legislasi Dan Perwakilan Politik*, Indigo Media, Tangerang, 2023.
- Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Didin Abidin, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.
- M. Pujo Darmo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press 2022.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2021.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, Jakarta, 2018.
- Yoyoh Rohaniah, *Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori Dan Praktik*, Intrans Publishing, Malang, 2017.

Jurnal :

Affan Ibnu, *Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Delegalata: Jurnal Ilmu Hukm Vol. 6, 2021, hlm. 128–139.

Afif, Zaid, *Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Journal Universitas Asahan Vol. 2, 2018, hlm. 55–60.

Ahadi, Lalu M Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–127.

Andrea, Danetta Leoni. “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* Vol.1, no. No.2 (2020).

Andriansyah, Muhammad Wahyu. “Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 431–443.

Andrias, Maria Yeti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmu Sosia* 3, no. 3 (2023): 306–313.

Ardianto, Sema. “Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 7, no. 1, 2022, hlm. 193–202.

Arfandy, Muh Farhan, Universitas Indonesia, A Rafika Maharani, and Universitas Hasanuddin. “Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia.” *Puskapsi Law Review*, 2024.

Azhar, Muhamad. “Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1, 2019, hlm. 171.

Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata

- Usana Negara (Teori Efektivitas Hukum).” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–140.
- Bakri, Riani, and Murtir Jeddawi. “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia Indonesia of Law State Index Analysis.” *Pallangga Praja* 4, no. 2 (2022): 109–110.
- Barlian, Aristo Evandy A. “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 605–622.
- Basuki Kurniawan, Nita Ryan Purbosar. “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi.” *Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 1 (2022): 86–87.
- Botutihe, Darwin. “Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 1 (2019): 102–126.
- Chandranegara, Ibnu Sina. “Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27 (2020): 78.
- Danusastro, Sunarno. “Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif.” *Jurnal Konstitusi*, no. 36 (2021).
- Dianisa, Tifani Rizki, and Gayatri Dyah Suprobowati. “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 298–305.
- Dion A.F Siallagan, Glosalia Siregar. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Baik (Good Government).” *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial* 2, no. 2 (2023).
- Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4 (2018).

- Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto, and Agus Riwanto. "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS VII*, no. 3 (2019): 52–61.
- Fikri, A.F.M. "Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2019-2022)." *Jurnal Ilmu Hukum Actual* 2, no. 2 (2024).
- Firdaus, Arikatul, Mahir Amin, and Sri Warjiyati. "Positivisme Hukum Dalam Prosedur Legislasi Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 195.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State of Law and Human Rights in Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–188.
- Halawa, Yanuarius, Kasman Siburian, dan Hisar Siregar. "Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah." *Journal of Constitutional and Administrative Law* 01 (2022): 35–44.
- Hamid, Erlangga, dan Putra Zakaria. "Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Legislasi Nasional Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023).
- Harjono, Dhaniswara K. "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 6 (2020): 3–4.
- Hasibuan, Hikmah Yani. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Di Kota Padangsidimpuan*. Padangsidimpuan: uinsyahada.ac.id, 2023.
- Huda, Muhammad Miftakhul. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono

- Soekanto.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 11, no. 1 (2022).
- Indriati, Noer, MuhammadTaufiq, dan Wismaningsih. “Sikap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Idea Hukum* 5, no. No. 1 (2019): 1386–1400.
- Iswari, Fauzi. “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Cendikia Hukum* 6, no. September (2020): 128.
- Iwan Sulistiyo, Widayati, and Sri Kusriyah. “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal.” *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, no. No. 1 (2018): 191–200.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019).
- Kristin, Merida. “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. No. 1 (2020).
- Kumalawati, Elis. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Universitas Islam Negeri Malang (2021).
- Kusnadi, Agus. “Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Peemerintahan Daerah.” *Arena Hukum* Vol.10, no. 23 (2017): 61–77.
- M. Riyanto, Vitalina Kovalenko. “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama” 5 (2023): 374–388.
- M, Bunga. “Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 818–833.
- Maki, Gloria Hana, Marthin Luther Lambonan, dan Susan Lawotjo. “Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Lex Privatum* Vol. 14, no. No. 3 (2023).
- Malena, Sarah. “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Daerah.” *Lex Privatum* XI, no. 2 (2023): 1–11.
- Mandala, A.S. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2022).
- Marlina, Rika. “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–178.
- Muhammad, Fadel, Tegnán Gbohó, and Gnatin Hilaire. “International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Community Participation in Regional Regulation Number 8 of 2009 Concerning Non-Smoking and Non-Smoking Areas in the Padang Panjang City.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, no. 8 (2020): 143–153.
- Muhammad Ikhsan Ritonga, Azwir Maa, Andre Defriansyah. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 32 (2023): 13333–13340.
- Mujahidatul Musfiroh. “Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Surakarta.” *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 7, no. 2 (2019): 62.
- Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas Jurnal Hukum* IV, no. 1 (2017): 130–152.
- Mustafa, Adriana. “Mplementasi Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam

- Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif.” *Jurnal Al-Qadau* (2018): 295–306.
- Nirwansyah. “Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 178–183.
- Nurhafidzahs, R.F. “Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Siyasa Syari’yyah.” *UIN Maulana Malik Ibrahim* (2024).
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama dan Sain* (2022): 49–58.
- Palullungan, Liberthin. *Pembentukan Peraturan Daerah*, 2023. PT Nas Media Indonesia.
- Prasetyo, Murkamtoro, dan Widayati. “Kajian Yuridis Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Studi Terhadap Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perda Di Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 3, no. September 2017 (2018): 643–654.
- Pratama, Surya Mukti, dan Hario Danang Pambudhi. “Kedudukan, Fungsi, Dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah.” *Jurnal Analisis Hukum* (2021): 120–130.
- Prayitno, Suko. “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferior.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8, no. No. 2 (2017): 109–120.
- Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 11.
- Putri, Aisyah Septia, dan Doris Febriyanti. “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

- Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Sungai Kedukan.” *Journal Of Social And Policy Issue* 3 (2022).
- R, Muhammad Rifyal Wardana. “Efektivitas Hukum.” *Filsafat Hukum Kelas Non Reguler* (2023).
- Rahmatullah, Indra. “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila.” *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* 4 (2020): 42–43.
- Raiyan, Muhammad. “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.” *Jurnal Universitas Malikussaleh* (2024).
- Rizqi, Amilia, Nur Rosyidah, Umar Faruq, dan M Saedi. “Urgensi Asas Ketuhanan Dakam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. November (2023).
- Rohmah, Siti Ngainnur, dan Abdur Rahim. “Peran Ma ’ Had Al-Zaytun Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fiqh Siyasah.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 11401–11412.
- Rokilah, R. “Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat Dan Rule Of.” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.
- Ruzuantika. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Parkir Kendaraan Di Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.” *repository.uin-suska.ac.id* (2024).
- S, Syahzidan Mahdi. “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid 19.” *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2021).
- Samekto, Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang

- Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19.
- Saputra, Angga. “Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum* 20 1 (2022): 135–148.
- Simamora, Janpatar. “Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial.” *Jurnal Dinamika Hukum* 7, no. 2 (2016): 179–186.
- Siregar, Siti Fadila. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah.” *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 7877–7890.
- Sudirman, Rusdianto. “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 46.
- Sugita, I Made. “Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Agama Hindu* 7, no. November (2024): 113.
- Ulfa, Armin.R.A. *Buku Ajaran Hukum Pemerintah Daerah*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- Ummah, Vina Rohmatul. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pendahuluan Terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua.” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 12 (2022).
- Veronica, Ayu, dan Kabib Nawawi. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster.” *Journal Of Criminal Law* 1 (2020): 45–57.
- Wiratmadinata, Wiratmadinata. “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP).” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022).
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum*. Pustaka Reka, 2020.

Yasser, M. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.” UINSU Medan (2021).

Zahro, Fatimah. “Partisipasi Masyarakat Pengembangan Pendidikan Islam.” Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam 1, no. 1 (2021).

Zubair, Ibnu. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berkeadilan.” Universitas Terbuka (2016).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.